



UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
LEMBAGA PENELITIAN

Alamat: Kampus Karangmalang, Yogyakarta 55281 Telp. (0274) 550839, Fax. (0274) 518617,
e-mail: sekreta@telkom.net

SURAT KETERANGAN
Nomor: 080/J35.21/PL.SK/2007

Lembaga Penelitian Universitas Negeri Yogyakarta menerangkan bahwa penelitian yang berjudul:

IDENTIFIKASI PROFIL PEMBIAYAAN PENDIDIKAN UNTUK MENINGKATKAN MUTU DAN PEMERATAAN PENDIDIKAN DASAR DI PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Dengan susunan personalia:

Nama Peneliti	Sebagai
1. Yoyon Suryono, M.S	Ketua
2. Sumarno, Ph.D.	Anggota
3. Hiryanto, M.Si	Anggota
4. Dra. MD Niron	Anggota

Telah diperiksa oleh:

Tim BPP yang terdiri dari tiga Penilai/Pembahas yang ditunjuk oleh Lembaga Penelitian Universitas Negeri Yogyakarta,

Hasil penilaian:

- a. AMAT BAIK
- b. BAIK
- c. KURANG

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 24 April 2007

Ketua,


Prof. Sukardi, Ph.D.
NIP. 130693813





DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
UPT PERPUSTAKAAN

Alamat: Karangmalang Yogyakarta. Telp. 0274-548520, 0274-586168 Pes. 226, 227.
e-mail: library@uny.ac.id Website: <http://library.uny.ac.id>

SURAT KETERANGAN

NO: 60/J35.31/PL/INV/2007

Kepala UPT Perpustakaan Universitas Negeri Yogyakarta, menerangkan bahwa penelitian yang berjudul:

“ IDENTIFIKASI PROFIL PEMBIAYAAN PENDIDIKAN UNTUK
MENINGKATKAN MUTU DAN PEMERATAAN PENDIDIKAN DASAR DI
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA “

Dengan personalia:

No.	Nama	Jabatan
1.	Yoyon Suryono	Ketua
2.	Sumarno	Anggota
3.	Hiryanto	Anggota
4.	M.D. Niron	Anggota

telah diterima pada tanggal 10 April 2007 sebanyak 1 (satu) eksemplar, berdasarkan surat keterangan dari Pembantu Dekan I Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta dengan nomor: 1608/H34.11/TU/2007. Dalam buku inventaris Perpustakaan tercatat dengan nomor: 0746139123.

Surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Yogyakarta, 10 April 2007

Kepala,

Sri Hartati, S.H.
NIP 131570319

LAPORAN PENELITIAN
IDENTIFIKASI PROFIL PEMBIAYAAN PENDIDIKAN
UNTUK MENINGKATKAN MUTU DAN PEMERATAAN
PENDIDIKAN DASAR
DI PROPINSI
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



Peneliti:

Yoyon Suryono
Sumarno
Hiryanto
M.D. Niron

Dibiayai Anggaran Daftar Isian Kegiatan (DIK) Tahun 2001
Lembaga Penelitian UNY, Nomor Kontrak 108/J.35.21/PL/2001

PUSAT PENELITIAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN
LEMBAGA PENELITIAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
2001

KATA PENGANTAR

Penelitian ini semula menekankan pada pengembangan model pembiayaan pendidikan untuk meningkatkan mutu dan pemerataan pendidikan dasar di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Memperhatikan masukan dan tanggapan dari para peserta seminar proposal dan pengembangan instrumen, penelitian ini kemudian mengalami perubahan penekanan menjadi penelitian untuk mengidentifikasi profil pembiayaan pendidikan, namun masih tetap untuk kepentingan meningkatkan mutu pendidikan dasar yang untuk tahap pertama penelitiannya dilakukan di sekolah dasar negeri dan swasta di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dengan selesainya penelitian ini, ucapan terima kasih dan penghargaan ingin disampaikan kepada:

1. Ketua dan Sekretaris Lembaga Penelitian Universitas Negeri Yogyakarta yang telah memfasilitasi terselenggaranya penelitian ini.
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan jajarannya yang telah membantu menyediakan kemudahan pengumpulan data di lapangan.
3. Bapak dan Ibu Kepala Sekolah, wakil Guru, wakil Orang Tua, dan segenap responden yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk mengisi dan mengembalikan kuesioner sehingga penelitian ini dapat terselenggara dengan baik.
4. Pihak-pihak lainnya yang tidak mungkin disebut di sini satu persatu, atas segala bantuan dan partisipasinya untuk melaksanakan penelitian ini.

Semoga hasil penelitian ini dapat membantu memperbaiki mutu dan pemerataan pendidikan (sekecil apapun) melalui penataan sistem pembiayaan pendidikan yang lebih sesuai dengan kebutuhan dalam konteks otonomi daerah dan otonomi pendidikan yang diimplementasikan melalui penerapan manajemen berbasis sekolah dan pendidikan berbasis masyarakat.

Yogyakarta, Desember 2001

Peneliti,

ABSTRAK

Dalam konteks desentralisasi pendidikan yang terapannya berupa manajemen berbasis sekolah dan pendidikan berbasis masyarakat, penataan sistem pembiayaan pendidikan sangat diperlukan. Asumsinya adalah bahwa ada keterkaitan antara pembiayaan pendidikan dengan mutu dan pemeranaan pendidikan, terutama pada tingkat pendidikan dasar. Oleh karena itu perlu dicari suatu model pembiayaan pendidikan yang lebih merata, efisien, dan dapat meningkatkan mutu dan pemerataan pendidikan. Penelitian ini mencoba mengidentifikasi profil pembiayaan pendidikan di tingkat sekolah dasar untuk kemudian dicoba dijelajahi kemungkinan dibuat suatu model pembiayaan pendidikan seperti dimaksud di atas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sumber pembiayaan pendidikan dan SD Negeri masih didominasi oleh penerimaan yang berasal dari pemerintah. Sumber penerimaan SD Swasta berasal dari orangtua dan bantuan masyarakat. Pola pengeluaran masih dipergunakan untuk membayar gaji guru. Alokasi untuk kegiatan proses belajar mengajar, pengadaan sarana dan prasarana masih sangat sedikit. Besarnya biaya langsung dan tidak langsung yang dibayar oleh orangtua lebih banyak untuk anaknya yang bersekolah di swasta daripada di sekolah negeri dan menyediakan lebih banyak uang untuk biaya langsung daripada biaya tidak langsung. Besarnya rata-rata unit cost sekolah swasta jauh lebih tinggi daripada sekolah negeri. Ditemukan adanya pola keterkaitan antara mutu sekolah dan pemerataan pendidikan dengan sumber dana dan jenis alokasi pengeluaran pada tingkat sekolah. Rekomendasi yang dapat diajukan adalah perlu ada kebijakan dasar untuk mengurangi ketergantungan sumber dana dari pemerintah dan meningkatkan sumber dana dari masyarakat yang dialokasikan untuk meningkatkan mutu dan pemerataan pendidikan. Perlu juga ada kejelasan siapa sebenarnya yang bertanggungjawab membiayai pendidikan pada tingkat pendidikan dasar untuk menuntaskan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun. Pembakuan berapa sebenarnya biaya yang diperlukan per satuan murid yang memenuhi batas-ambang mutu yang berorientasi ke masa depan, sangat diperlukan. Temuan penelitian ini perlu dilengkapi dan dikomparasikan dengan penelitian serupa untuk tingkat sekolah lanjutan pertama.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i	
ABSTRAK	ii	
DAFTAR ISI	iii	
DAFTAR TABEL	iv	
BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang	1
	B. Masalah Penelitian	2
	C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	2
BAB II	KAJIAN PUSTAKA	4
	A. Desentralisasi Pendidikan	4
	B. Mutu Pendidikan	4
	C. Pembiayaan Pendidikan	6
	D. Kerangka Berfikir	8
BAB III	METODOLOGI PENELITIAN	10
	A. Jenis Penelitian	10
	B. Populasi dan Sampel	10
	C. Teknik Pengumpulan Data	10
	D. Teknik Analisis Data	11
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	12
	A. Pembiayaan Pendidikan	12
	B. Mutu dan Pemerataan Pendidikan	14
	C. Pembiayaan Pendidikan, Mutu, dan Pemerataan Pendidikan	16
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN	19
DAFTAR PUSTAKA		21
LAMPIRAN-LAMPIRAN		23

DAFTAR TABEL

1. Persentase Sumber Penerimaan terhadap Total Penerimaan Sekolah	6
2. Profil Pembiayaan Pendidikan (dalam ribuan)	12
3. Biaya Langsung dan Tidak Langsung dari Orangtua	13
4. Rata-rata Unit Cost SD Negeri dan Swasta (dalam ribuan)	14
5. Gambaran Umum SD dan MI Menurut Aspek Mutu	15
6. Klasifikasi Sekolah	16
7. Mutu Sekolah Negeri dan Swasta dan Profil Sumber Penerimaan	16
8. Mutu Sekolah Negeri dan Swasta dan Profil Sisi Pengeluaran	17

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Mutu dan pemerataan pendidikan di Indonesia masih tergolong relatif rendah. Sebagai ilustrasi, rendahnya mutu sekolah dasar ditunjukkan oleh rendahnya kemampuan membaca, menulis, dan berhitung, dan rendahnya kemampuan matematika dan IPA (Elley, 1992, Bank Dunia, 1997, dan Don Adam, 1998). Rendahnya mutu sekolah menengah, terutama SLTP, dilihat dari rendahnya perolehan NEM (Budiono, 1997, Don Adam, 1998), dan juga rendahnya kemampuan matematika dan IPA (http://nces.ed.gov/timms/figure_1-2.jpg).

Laporan Bank Dunia yang berjudul *Education in Indonesia: From Crisis to Recovery* (1998) mengidentifikasi empat kelemahan institusional sebagai penyebab potensial terhambatnya kemajuan pendidikan di Indonesia, khususnya pada tingkat pendidikan dasar, yaitu (1) sistem organisasi yang kompleks di tingkat pendidikan dasar, (2) manajemen yang terlalu sentralistik pada tingkat SLTP, (3) terpecah-belah dan kakunya proses pembiayaan pendidikan pada tingkat sekolah dasar dan SLTP, dan (4) manajemen yang tidak efektif pada jenjang sekolah.

Untuk meningkatkan mutu dan pemerataan pendidikan, khususnya pada tingkat pendidikan dasar, kelemahan-kelemahan institusional tersebut harus diatasi. Bank Dunia dalam laporan tersebut di atas, merekomendasikan lima aspek yang diproyeksikan akan mampu mengatasi kelemahan institusional yang dimaksud, yaitu dengan (1) pemberdayaan lokal, (2) penetapan kembali tanggung jawab atas perencanaan jangka panjang, (3) pembangunan kemampuan kelembagaan, (4) pemberian otonomi yang lebih besar dengan manajemen sekolah yang bertanggung jawab, dan (5) sistem pendanaan yang menjamin pemerataan dan efisiensi.

Lima aspek rekomendasi yang diajukan Bank Dunia mendorong lahir dan diberlakukannya otonomi dan desentralisasi dalam pengelolaan pendidikan di Indonesia yang implementasinya kemudian pada tingkat pendidikan dasar berupa diterapkannya manajemen berbasis sekolah (*school-based management*) dan pendidikan berbasis masyarakat (*community-based education*) sejalan dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 25 Tahun

1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.

B. MASALAH PENELITIAN

Dalam konteks desentralisasi pendidikan yang terapannya berupa manajemen berbasis sekolah dan pendidikan berbasis masyarakat penataan sistem pembiayaan pendidikan sangat diperlukan agar dapat meningkatkan kinerja sekolah dan mutu pendidikan. Asumsinya adalah bahwa ada keterkaitan antara pembiayaan pendidikan dengan kinerja sekolah, mutu dan pemerataan pendidikan, terutama pada tingkat pendidikan dasar. Oleh karena itu perlu dicari suatu model pembiayaan pendidikan yang lebih merata, efisien, dan dapat meningkatkan kinerja sekolah, mutu dan pemerataan pendidikan. Penelitian ini akan mencoba mengidentifikasi profil pembiayaan pendidikan yang terjadi di tingkat pendidikan dasar, terutama di sekolah dasar (SD) untuk kemudian dicoba dijelajahi kemungkinan dibuat suatu model pembiayaan pendidikan yang lebih merata, efisien, dan dapat meningkatkan kinerja sekolah, mutu dan pemerataan pendidikan.

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi profil pembiayaan pendidikan yang terjadi di tingkat sekolah dasar di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk kemudian dicoba dijelajahi kemungkinan dibuat suatu model pembiayaan pendidikan yang lebih merata, efisien, dan dapat meningkatkan kinerja sekolah, mutu dan pemerataan pendidikan. Hasil penelitian berguna untuk menemukan peluang menggali sumber dana yang diperlukan baik dari sumber pemerintah maupun dari masyarakat dan dunia usaha serta untuk merealokasi sisi pengeluaran yang lebih dapat meningkatkan kinerja sekolah, mutu dan pemerataan pendidikan di tingkat sekolah dasar.

D. Pembatasan Istilah

1. Pembiayaan pendidikan

Bagian dari ekonomi pendidikan yang mengkaji tentang bagaimana dana pendidikan diperoleh, siapa yang harus membiayai pendidikan, siapa yang menjadi sasaran dan yang menikmati biaya pendidikan itu, dan bagaimana biaya pendidikan dialokasikan secara adil dan merata.

2. Mutu pendidikan

Kesesuaian sifat-sifat produk pendidikan dengan kebutuhan pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*), termasuk di dalamnya kebutuhan peserta didik dan pengguna lulusan atau dunia kerja.

3. Pemerataan pendidikan

Perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu tinggi bagi seluruh warga negara, khususnya anak usia sekolah dasar sebagai implementasi wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. DESENTRALISASI PENDIDIKAN

Desentralisasi pendidikan, terutama aspek administrasi, berdampak positif pada peningkatan mutu pendidikan. Konsep desentralisasi pendidikan mencakup banyak hal baik sebagai aktifitas politik yang melibatkan pemerintah dan masyarakat, maupun sebagai perpindahan kewenangan kebijakan pendidikan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dan perpindahan berbagai kebijakan pendidikan dari pemerintah ke masyarakat atas dasar asumsi bahwa struktur administrasi sekolah dan penyerahan pengambilan keputusan serta akuntabilitas terbuka kepada masyarakat dan sekolah sangat penting dalam meningkatkan mutu pendidikan (Stinnette, 1993; Burnett, et al 1995; Bank Dunia, 1995, 1998; Fiske, 1996, dan Habibi, 2001).

Desentralisasi pendidikan menunjuk juga kepada konsep ekuiti dan efisiensi yang diarahkan pada meningkatnya kesejahteraan sosial dan efisiensi teknis (Winkler, 1992). Secara konseptual, desentralisasi pendidikan memiliki banyak arti dan makna seperti dekonsentrasi, delegasi, devolusi, dan privatisasi (Florestal dan Cooper, 1997). Secara lebih khusus, desentralisasi pendidikan dapat dimaknai juga sebagai *school-based management* atau *school-site management* (Mankoe dan Maynes, 1992).

Dalam konteks desentralisasi pendidikan, Fiske (1996) mengidentifikasi delapan pihak yang berkepentingan dengan pendidikan yaitu (1) pemimpin politik dan pengambil kebijakan, (2) pegawai departemen, (3) guru, (4) organisasi guru, (5) universitas, (6) orang tua, (7) masyarakat lokal, dan (8) siswa atau murid.

Dari sudut jenis keputusan yang dapat didesentralisasikan, Burki, et al (1999) menguraikan aspek-aspek pendidikan yang dapat didesentralisasikan yaitu (1) sistem pembelajaran, (2) manajemen personalia, (3) perencanaan dan struktur, dan (4) sumber daya (lihat juga Ninasapti, 2001).

B. MUTU PENDIDIKAN

Perbaikan yang mutlak perlu dilakukan dalam bidang pendidikan adalah meningkatkan mutu pendidikan, khususnya pada tingkat pendidikan dasar yang memiliki peranan strategis dalam pengembangan sumberdaya manusia dan memiliki umpan-balik yang positif.

Meningkatkan mutu pendidikan dasar memerlukan tersedianya faktor-faktor masukan dan faktor eksternal yang mendukung terjadinya proses pembelajaran. Pembiayaan pendidikan merupakan salah satu faktor masukan yang memiliki sumbangan berarti pada peningkatan mutu pendidikan. Kebijakan desentralisasi pendidikan merupakan faktor eksternal yang sangat berpengaruh dan dapat mengkondisikan tersedianya faktor-faktor masukan, khususnya pembiayaan pendidikan yang mencukupi untuk terlaksananya proses pembelajaran yang dapat meningkatkan mutu pendidikan.

Konsep mutu pendidikan atau kualitas sekolah selalu disejajarkan, meskipun sebenarnya berbeda dengan konsep efektifitas sekolah dan efisiensi. Kualitas sekolah menunjuk pada pengukuran *input-process-output-outcome*. Pengukuran *input* seperti kualifikasi guru, ketersediaan fasilitas, peralatan, dan bahan-bahan. Pengukuran *process* seperti interaksi guru-murid, jam efektif siswa, penggunaan fasilitas dan peralatan. Pengukuran *output* seperti skor tes, tingkat kenaikan atau kelulusan. Pengukuran *outcome* menyangkut kesuksesan para lulusan secara ekonomi dan sosial. Terdapat banyak variasi menerjemahkan pengukuran mutu sekolah (Chapman dan Windham, 1986; Ellis dan Fouts, 1993; Arcaro, 1995; Don Adam, 1996; Betts, 1999).

Efektivitas sekolah pada umumnya dibatasi hanya pada pengukuran *output*. Antara input dan output dijumpai oleh konsep efisiensi internal. Dapat terjadi bahwa tercapainya mutu sekolah dan efektivitas sekolah tanpa adanya efisiensi dalam sekolah. Konsep efisiensi internal lebih khusus daripada konsep mutu sekolah atau efektivitas sekolah karena berkaitan dengan kelangkaan atau keterbatasan sumber-sumber dan pemanfaatannya dalam sekolah. Konsep efisiensi internal dapat diadaptasi untuk mempertimbangkan konsep ekuiti dan akses (Levin, 1975; Rothenberg, 1975; Berne dan Stifle, 1995).

Teori fungsi produksi dalam pendidikan yang berinduk pada teori modal manusia banyak digunakan untuk menjelaskan mutu sekolah melalui penelusuran keterkaitan faktor-faktor masukan dengan prestasi belajar siswa. Picus (1995) menyebutkan bahwa: "*A production function is a model that identifies the possible outcomes that can be achieved with a given combination of inputs*". Beberapa penelitian di bidang ini antara lain Coleman, et al (1996); Hanushek (1981, 1986, 1989); Ferguson (1991); Hedges, Laine, dan Greenwald (1994); Picus (1993, 1995); dan Caldwell (1995).

C. PEMBIAYAAN PENDIDIKAN

Dalam ekonomi pendidikan, pembiayaan pendidikan dibedakan dengan biaya pendidikan. Biaya pendidikan mengkaji tentang biaya langsung dan biaya tidak langsung. Fokus analisisnya pada aspek marjinalnya, rata-rata *unit-cost*, nilai tambah, dan efisiensi pengalokasiannya. Pembiayaan pendidikan mengkaji tentang bagaimana biaya itu diperoleh. Fokusnya pada siapa yang membiayai pendidikan, siapa yang menikmati, dan bagaimana supaya adil dan merata (Mulyani A. Nurhadi, 1993).

Pembiayaan pendidikan menyangkut sisi penerimaan dan sisi pengeluaran. Secara konseptual ada tiga model pembiayaan pendidikan baik untuk sisi penerimaan maupun sisi pengeluaran (Ninasapti, dkk., 2001). Pertama, pemerintah pusat menyerahkan sejumlah dana kepada pemerintah daerah dalam bentuk *block-grant* yang antara lain didasarkan atas rata-rata biaya per sekolah dan kondisi spesifik daerah (Ma, 1997). Selanjutnya pemerintah daerah menentukan jenis pengeluaran dana tersebut. Kedua, memberikan uang langsung kepada pihak sekolah dan sekolah berhak menentukan sendiri alokasi penggunaan dana subsidi sekolah (*direct school subsidy*) tersebut (Dandekar, 1996). Ketiga, memberikan dana publik untuk pendidikan langsung ke individu atau institusi (a.l. rumah tangga) berdasarkan permintaan untuk pendidikan. Salah satu bentuk pembiayaan jenis ini adalah sistem *voucher* (Patrinos dan Ariasingam, 1997).

Skema Desentralisasi Pembiayaan Pendidikan

Sisi dan Sumber Dana	Pemerintah	Masyarakat
Penawaran	1. Dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dalam bentuk <i>block-grant</i> .	Sumber dana yang masih perlu digali
	2. Dana dari pemerintah pusat langsung ke sekolah dalam bentuk subsidi seperti DBO dan JPS.	
Pemintaan	Dana dari pemerintah pusat langsung ke individu atau rumah tangga dalam bentuk biaya langsung dan tidak langsung seperti <i>voucher</i> .	

Dalam mekanisme APBN, struktur pembiayaan pendidikan pada tingkat pendidikan dasar terdiri dari anggaran rutin (DIP) sebesar 85 % terbagi untuk gaji (83 %) dan nongaji (2 %) dan anggaran pembangunan (DIP) sebesar 15 %. Untuk sekolah dasar ditambah sumber lain berupa INPRES SD dan subsidi bantuan penyelenggaraan pendidikan (SBPP) SD. Selain itu, masih ada sumber penerimaan lain yaitu dari orang tua siswa dalam bentuk SPP (BP3) dan bantuan masyarakat. Tabel di bawah ini menggambarkan persentase sumber penerimaan terhadap total penerimaan sekolah yang dihitung dari hasil penelitian Clark tahun 1998 (Ninasapti, dkk, 2001).

Tabel 1 Persentase Sumber Penerimaan terhadap Total Penerimaan Sekolah

Jenis Pend	Penerimaan Sekolah/siswa	Persentase Sumber penerimaan/Total Penerimaan			
		Pem.Pusat	Kel/Yayasan	Pem.Daerah	Masy/Tab
SD Negeri	197,000	93	6	1	0
SD Swasta	176,000	69	30	0	1
MI Negeri	140,000	96	4	0	0
MI Swasta	93,000	69	25	2	4

Clark, et al (1998) dalam laporan penelitiannya yang berjudul *Financing of Education in Indonesia* menemukan angka-angka sebagai berikut. Pada tingkat nasional, seluruh pengeluaran tahunan untuk pendidikan pada tahun anggaran 1995/1996 sebesar Rp 21,649 milyar setara dengan 5 persen dari GNP. Pengeluaran dari pemerintah pusat sebesar 55,25 %, dari keluarga yang dikeluarkan langsung sebesar 28,14 persen, dan pengeluaran dari keluarga yang dibayarkan tidak langsung sebesar 16,5 %. Jumlah siswa seluruhnya 45,177 ribu.

Di tingkat SD (negeri dan swasta), jumlah siswa sebanyak 29,448 ribu. Pengeluaran dari pemerintah pusat sebesar 75,15 %, dari keluarga yang dibayarkan langsung sebesar 7,32 persen, dan pengeluaran dari keluarga yang tidak dibayarkan langsung sebesar 16,53 %, setara dengan 34 % dari seluruh pengeluaran pada tingkat nasional.

Dibedakan antara negeri dan swasta, jumlah siswa SD Negeri sebanyak 24,057 ribu. Seluruh pengeluaran untuk SD Negeri sebesar Rp 5,773 juta. Pengeluaran dari pemerintah pusat sebesar 96,3 %, dari keluarga yang dibayarkan langsung dan lain-lain sebesar 3,5 %. Seluruh pengeluaran untuk SD Negeri sekitar 95,40 %. Untuk SD Swasta jumlah siswa 1,892 ribu. Pengeluaran dari pemerintah pusat sebesar 60,75 % dan

pengeluaran dari keluarga yang dibayarkan langsung dan lain-lain sebesar 39,25 %. Seluruh pengeluaran untuk SD Swasta sebesar 4,60 %.

Pengeluaran keluarga untuk pendidikan per siswa yang dibayarkan ke sekolah dan yang dibelanjakan langsung untuk SD Negeri sebesar Rp 53 ribu yang terdiri dari Rp 12 ribu dibayarkan ke sekolah dan Rp 41 ribu (77 %) dibelanjakan langsung. Untuk SD Swasta pengeluaran seluruhnya Rp 124 ribu yang terdiri dari Rp 53 ribu dibayarkan langsung dan Rp 71 ribu (57 %) dibelanjakan langsung oleh keluarga.

D. KERANGKA FIKIR

Penelitian ini dilandasi oleh asumsi bahwa desentralisasi pendidikan sebagai implementasi otonomi pendidikan dalam bentuk manajemen berbasis sekolah dan pendidikan berbasis masyarakat pada tataran sekolah akan mampu menciptakan kondisi bagi pencapaian kinerja sekolah, mutu, dan pemerataan pendidikan jauh lebih baik. Dalam lingkup dan wacana ini penataan sistem pembiayaan pendidikan yang efisien, merata, dan dapat meningkatkan kinerja dan mutu sekolah pada tingkat pendidikan dasar sangat diperlukan.

Pembiayaan pendidikan pada tingkat pendidikan dasar, khususnya sekolah-sekolah negeri, sumber penerimaan hampir seluruhnya diperoleh dari pemerintah pusat dan daerah. Kontribusi orang tua, dunia usaha, dan masyarakat masih relatif kecil. Sebaliknya, pada sekolah-sekolah swasta, sumber penerimaan sebagian besar berasal dari masyarakat. Kontribusi pemerintah pusat dan daerah masih sangat kecil. Penelitian ini akan menjelajahi peluang ditemukan satu pola alokasi sumber penerimaan yang lebih mencerminkan pemerataan dan keadilan pada tingkat sekolah antara sekolah negeri dan sekolah swasta.

Pada sisi pengeluaran, sumber penerimaan yang diperoleh dari pemerintah pusat pada sekolah-sekolah negeri sebagian besar dibayarkan untuk gaji guru (berupa dana rutin), masih sangat sedikit untuk kegiatan pengembangan. Hal serupa terjadi juga di sekolah-sekolah swasta. Keterkaitan pola pembiayaan pendidikan dengan peningkatan kinerja sekolah, mutu dan pemerataan pendidikan akan ditelaah melalui penelitian ini. Suatu bentuk alokasi sisi pengeluaran yang dapat mendukung tercapainya pencapaian kinerja sekolah, mutu, dan pemerataan pendidikan yang menekankan pada alokasi untuk peningkatan dan pengembangan proses pembelajaran diharapkan akan dapat dirumuskan. Kinerja sekolah, mutu, dan pemerataan pendidikan akan meningkat apabila alokasi sisi

pengeluaran dari anggaran sekolah diprioritaskan pada membiayai proses pembelajaran yang terjadi di dalam kelas. Dalam pembiayaan seperti ini akan terjadi keseimbangan antara keberlanjutan kegiatan rutin dan pengembangan yang didukung oleh pendanaan yang bersumber dari pemerintah dan bersumber dari orang tua dan masyarakat baik pada sekolah negeri dan lebih-lebih sekolah swasta.

BAB III METODE PENELITIAN

A. JENIS PENELITIAN

Penelitian ini dirancang sebagai penelitian survey-evaluatif dengan fokus kajian pada penelaahan profil pembiayaan pendidikan, mutu, dan pemerataan pendidikan di sekolah dasar. Penekanan evaluatif bermaksud untuk menelaah pembiayaan pendidikan yang dilaksanakan di sekolah dasar dalam keterkaitannya dengan peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan yang akan menjadi dasar untuk menemukan pola dan mengembangkan model konseptual pembiayaan pendidikan yang mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan di tingkat pendidikan dasar.

B. POPULASI DAN SAMPEL

Penelitian dilaksanakan di satu kota dan dua kabupaten yang diperkirakan mewakili karakteristik Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Kulon Progo dengan sampel daerah masing-masing satu kecamatan yang dipandang memiliki sekolah dasar tergolong baik, yaitu Kecamatan Gondokusuman (Kota Yogyakarta), Kecamatan Depok (Kabupaten Sleman), dan Kecamatan Wates (Kabupaten Kulon Progo).

Tahap pertama penelitian baru dilaksanakan pada sekolah dasar negeri dan swasta dengan jumlah sampel untuk setiap kecamatan adalah 12 SD Negeri dan 6 SD Swasta. Masing-masing sekolah terdiri dari tiga orang responden yaitu Kepala Sekolah, wakil Guru, dan wakil orang tua siswa. Pada setiap kecamatan ditetapkan lima orang responden yang terdiri dari pengawas, unsur pemerintah kecamatan, tokoh masyarakat, wakil organisasi profesi, dan wakil lembaga swadaya masyarakat.

C. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner yang dirancang untuk mengidentifikasi profil pembiayaan pendidikan dan mengetahui mutu dan pemerataan pendidikan di sekolah dasar negeri dan swasta di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Wawancara dilakukan terhadap beberapa responden yang mengisi kuesioner tidak lengkap dan memerlukan data tambahan lebih rinci dan mendalam.

D. TEKNIK ANALISIS DATA

Data yang terkumpul diolah, disajikan, dan dianalisis secara deskriptif. Penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif-empirik untuk memperoleh gambaran (profil) pembiayaan pendidikan di sekolah dasar dan keterkaitannya dengan mutu dan pemerataan pendidikan.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. PEMBIAYAAN PENDIDIKAN

Profil pembiayaan pendidikan untuk SD Negeri dan Swasta di Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Kulon Progo yang meliputi penerimaan dan pengeluaran disajikan dalam Tabel 2 di bawah ini.

Tabel 2 Profil Pembiayaan Pendidikan (dalam persen)

No.	Penerimaan & Pengeluaran	Kota/Kabupaten						Rata-rata	
		Yogyakarta		Sleman		Kulon Progo		Neg	Swas
<i>A.</i>	<i>Penerimaan</i>								
1.	Pemerintah	76,19	22,49	89,31	97,13	89,71	81,79	85,07	67,14
2.	Orang tua	23,36	75,43	10,69	2,87	8,87	15,29	14,31	31,20
3.	Masyarakat	0,15	0,87	-	-	1,42	2,94	0,52	1,27
4.	Lain-lain	0,31	1,21	-	-	-	-	0,10	0,40
	Jumlah	100	100	100	100	100	100	100	100
<i>B.</i>	<i>Pengeluaran</i>								
1.	Gaji	84,3	95,06	86,74	95,93	89,14	83,89	86,73	91,63
2.	Kesejahteraan	1,61	0,08	2,19	0,69	0,98	1,18	1,59	0,65
3.	PBM	2,61	0,74	4,97	0,31	1,53	1,29	3,04	0,78
4.	Perlengkapan	5,40	1,09	1,35	0,62	3,06	4,35	3,27	2,02
5.	Pergedungan	2,93	0,02	1,58	0,67	2,53	4,78	2,35	1,82
6.	Ekstrakurikuler	1,43	2,76	1,68	1,28	1,71	3,07	1,61	2,37
7.	Lain-lain	1,75	0,05	1,49	0,51	1,06	1,44	1,41	0,67
	Jumlah	100	100	100	100	100	100	100	100

Sekolah dasar negeri dan swasta di Kota Yogyakarta mendapat alokasi dari pemerintah lebih kecil (76,19%) dibanding penerimaan SD di Kabupaten Sleman (89,31%) dan Kabupaten Kulon Progo (89,71%). Tetapi, penerimaan dari orang tua dan masyarakat lebih tinggi, yaitu Kota Yogyakarta (23,36%), Kabupaten Sleman (10,69%), dan Kabupaten Kulon Progo (8,87%).

Di Kota Yogyakarta, sumber penerimaan SD Swasta terbesar berasal dari orang tua dan masyarakat (75,43%). Tetapi untuk Kabupaten Sleman dan Kabupaten Kulon Progo masih menunjukkan sumber penerimaan sebagian besar dari pemerintah. Penerimaan dari orang tua dan masyarakat masing-masing hanya 15,87% untuk Kabupaten Sleman dan 15,29% untuk Kabupaten Kulon Progo.

Dari sudut pengeluaran, pola yang ditemukan hampir sama yaitu sebagian besar pengeluaran dipergunakan untuk gaji. Alokasi untuk proses belajar mengajar, sarana dan prasarana, serta kegiatan ekstrakurikuler masih sangat kecil, kurang dari lima persen. Kecuali Kota Yogyakarta mengalokasikan untuk sarana dan prasarana sekitar 5 persen.

Dilihat dari besarnya biaya langsung dan biaya tidak langsung yang dibayarkan oleh orang tua dan besarnya rata-rata unit cost untuk tiap sekolah dasar negeri dan swasta di Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Kulon Progo disajikan pada Tabel 3 dan 4 di bawah ini.

Tabel 3 Biaya Langsung dan Tidak Langsung dari Orang Tua (ribuan)

No.	Sekolah	Biaya Langsung			Biaya Tidak Langsung		
		Jumlah	Orang Tua		Jumlah	Orang Tua	
			Jumlah	%		Jumlah	%
1.	Yogyakarta						
	SD Negeri	1.346.304	146.390	10,87	1.379.579	33.275	2,14
	SD Swasta	322.369	243.368	75,49	422.244	99.875	23,65
2.	Sleman						
	SD Negeri	1.096.007	126.309	11,52	1.122.450	26.443	2,35
	SD Swasta	117.034	3.360	2,87	141.764	24.730	17,44
3.	Kln. Progo						
	SD Negeri	212.731	6.112	2,87	217.261	4.530	2,08
	SD Swasta	198.476	30.342	15,28	226.126	27.650	12,22

Informasi yang diperoleh dari Tabel 3 adalah kontribusi orang tua terhadap pembiayaan pendidikan di sekolah negeri baik langsung dan tidak langsung di Kota Yogyakarta sekitar 13 %, Kabupaten Sleman 14 %, dan Kabupaten Kulon Progo sebesar 5 %. Pada sekolah swasta di Kota Yogyakarta sebesar lebih 95 %, Kabupaten Sleman 20 % dan Kabupaten Kulon Progo sebesar 27 %. Pola umum yang dapat dirumuskan yaitu besarnya kontribusi orang tua terhadap pembiayaan pendidikan di sekolah negeri jauh lebih sedikit dibanding dengan kontribusi orang tua di sekolah swasta, baik biaya langsung maupun tidak langsung.

Seperti disajikan pada Tabel 4 besarnya *unit cost* sekolah dasar negeri lebih kecil jika dibandingkan dengan sekolah dasar swasta. Perbandingan besarnya *unit cost* antara sekolah negeri dan sekolah swasta adalah 1:3,07 untuk Kota Yogyakarta, 1:1,95 untuk Kabupaten Sleman, dan 1:3,13 untuk Kabupaten Kulon Progo.

Tabel 4 Rata-rata *Unit Cost* SD Negeri dan Swasta (dalam ribuan)

No.	Sekolah	Jumlah Siswa	Jumlah Penerimaan	Jumlah Pengeluaran	Rata-rata Unit Cost
1.	Yogyakarta				
	SD Negeri	2.167	1.346.304	1.345.176	620
	SD Swasta	1.284	2.452.369	2.452.369	1.909
2.	Sleman				
	SD Negeri	2.951	1.096.007	1.087.868	368
	SD Swasta	163	117.034	117.034	718
3.	Kulon Progo				
	SD Negeri	1.271	212.731	212.749	167
	SD Swasta	380	198.476	198.986	523

B. MUTU DAN PEMERATAAN PENDIDIKAN

Tabel 5 menunjukkan mutu dan pemerataan pendidikan di SD dan MI di Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Kulon Progo. Informasi yang dapat diperoleh dari Tabel 5 tersebut antara lain adalah (1) dilihat dari ukuran kelas, pada umumnya SD di Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Kulon Progo tergolong cukup, artinya memiliki kelas yang lengkap mulai dari kelas I sampai VI dengan jumlah siswa memenuhi ukuran kelas sekitar 30 siswa; (2) sekolah yang memiliki ukuran kelas lebih dari 30 siswa dan memiliki kelas paralel terdapat sekitar 40 sampai 45 %.

Untuk Kota Yogyakarta catatan penting yang perlu disampaikan adalah tentang siswa penerima beasiswa, nilai Ebtanas, Nilai Cawu, dan lingkungan sekolah. Siswa penerima beasiswa lebih banyak berada di sekolah yang tergolong baik. Nilai Ebtanas, nilai Cawu, dan lingkungan sekolah pada sekolah-sekolah tergolong cukup, setara dengan sekolah-sekolah yang tergolong baik. Artinya, aspek mutu antara sekolah baik dengan sekolah cukup dilihat dari aspek nilai Ebtanas, nilai Cawu, dan lingkungan sekolah masih relatif sama, hanya berbeda pada beberapa aspek yang lainnya.

Data di Kabupaten Sleman menunjukkan kecenderungan yang sama yaitu bahwa penerima beasiswa lebih banyak berada di sekolah yang tergolong cukup. Demikian juga nilai cawu, fasilitas sekolah dan lingkungan sosial antara sekolah yang tergolong baik dengan sekolah yang tergolong cukup tidak banyak perbedaannya. Sementara itu data guru, baik kualifikasi maupun pengalaman guru, serta data putus sekolah dan angka melanjutkan tidak dapat diperoleh secara memuaskan pada sekolah-sekolah yang tergolong cukup. Dengan demikian membedakan antara sekolah baik dan sekolah cukup masih memerlukan data dan pengkajian lebih mendalam.

Pola yang sama terjadi juga di Kabupaten Kulon Progo. Beberapa aspek mutu yang menonjol pada sekolah yang tergolong cukup adalah ukuran kelas, siswa penerima beasiswa, nilai cawu, fasilitas sekolah, dan lingkungan sosial. Sedangkan pada sekolah yang tergolong baik adalah jumlah guru, kualifikasi guru, tingkat pendidikan guru, pengalaman guru, dan nilai ebtanas. Pola seperti ini menggambarkan situasi mutu sekolah di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, baik sekolah yang tergolong baik maupun sekolah yang tergolong cukup. Aspek mutu yang menonjol pada sekolah yang termasuk baik adalah jumlah guru, kualifikasi guru, tingkat pendidikan guru, pengalaman guru, nilai ebtanas, tingkat efisiensi, fasilitas sekolah, dan lingkungan sosial. Pada sekolah yang tergolong cukup aspek mutu yang menonjol yaitu ukuran kelas yang cenderung kecil, siswa penerima beasiswa yang cenderung banyak, dan nilai cawu yang cenderung relatif rendah.

Tabel 5 Gambaran Umum SD dan MI Menurut Aspek Mutu

No	Aspek Mutu	Kota/Kabupaten						Jumlah	
		Yogyakarta		Sleman		Kulon Progo			
		B	C	B	C	B	C	B	C
1.	Ukuran kelas	6	10	6	10	3	7	15	27
2.	Beasiswa	10	5	7	8	4	6	21	19
3.	Jumlah Guru	13	3	14	2	10	-	37	5
4.	Kualifikasi Guru	14	1	15	-	10	-	39	1
5.	Tingkat Pendidikan	14	2	14	2	8	2	36	6
6.	Pengalaman Guru	14	1	15	-	8	2	37	3
7.	Status Guru	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Nilai Ebtanas	10	5	13	2	9	1	32	8
9.	Nilai Cawu	6	5	4	10	5	5	15	20
10.	Putus sekolah, dll	13	3	9	-	8	2	30	5
11.	Fasilitas sekolah	12	4	8	7	6	4	26	15
12.	Lingkungan sosial	11	5	9	7	7	3	27	15

Gambaran mutu sekolah di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta secara umum ditampilkan oleh Tabel 6 yang merupakan rangkuman dari Tabel 5 tersebut di atas. Dari jumlah sampel sekolah sebanyak 42, ternyata yang tergolong baik ada 24 sekolah dan yang tergolong cukup ada 18 sekolah. Distribusinya adalah di Kota Yogyakarta terdapat 9 sekolah termasuk baik dan 7 cukup. Di Kabupaten Sleman antara sekolah yang termasuk baik dan cukup jumlahnya sama yaitu masing-masing 8 sekolah. Di Kabupaten Kulon Progo sekolah termasuk baik ada 7 dan sekolah termasuk cukup ada 7 sekolah.

Tabel 6 Klasifikasi Sekolah Menurut Kota/Kabupaten

No.	Klasifikasi	Kota/Kabupaten			Jumlah
		Yogyakarta	Sleman	Kulon Progo	
1.	Baik	9	8	7	24
2.	Sedang/Cukup	7	8	3	18
	Jumlah	16	16	10	42

C. PEMBIAYAAN PENDIDIKAN, MUTU, DAN PEMERATAAN PENDIDIKAN

Keterkaitan pembiayaan pendidikan dengan mutu dan pemerataan pendidikan secara sederhana disajikan pada tabel silang dua variabel di bawah ini. Informasi yang ingin diperoleh adalah apakah benar ada keterkaitan antara profil pembiayaan pendidikan (baik pada sisi penerimaan maupun sisi pengeluaran) dan mutu serta pemerataan pendidikan.

Tabel 7 Mutu Sekolah Negeri dan Swasta dan Profil Sumber Penerimaan (dalam rata-rata persen per sekolah)

No.	Mutu Sekolah (n)	Profil Sumber Penerimaan				Jumlah
		Pemerintah	Orang Tua	Masyarakat	Lain-lain	
1.	Negeri					
	a. Baik (21)	3,58	4,18	-	-	3,88
	b. Cukup (6)	4,15	2,04	-	-	3,10
	Rata-rata (27)	3,87	3,13	-	-	
2.	Swasta					
	a. Baik (4)	8,53	22,02	-	-	15,27
	b. Cukup (2)	32,95	5,96	-	-	19,46
	Rata-rata (6)	20,74	13,99	-	-	17,37

Tabel 7 memberikan informasi keterkaitan pola pembiayaan dan mutu sekolah sebagai berikut:

1. SD Negeri yang tergolong baik cenderung memperoleh alokasi dana dari pemerintah tinggi dan dari masyarakat juga tinggi;
2. SD Negeri yang tergolong cukup cenderung memperoleh alokasi dana dari pemerintah tinggi, tetapi dari masyarakat rendah.
3. SD Swasta yang tergolong baik memperoleh dana dari pemerintah kecil, sebaliknya dari masyarakat relatif sangat tinggi.
4. SD Swasta yang tergolong cukup memperoleh alokasi dana dari pemerintah tinggi, tetapi dari masyarakat relatif rendah.

Kesimpulan umum yang dapat diambil adalah adanya kecenderungan perbedaan pola pembiayaan pendidikan dan mutu sekolah antara sekolah negeri dengan sekolah swasta dan antara sekolah yang tergolong baik dengan sekolah yang tergolong cukup, dilihat dari sumber dana yang diperoleh. Pola alokasi sumber dana sebagaimana dijelaskan di atas menyiratkan juga adanya ketidakmerataan dalam sistem pengalokasiannya pada sekolah negeri dan swasta dan pada sekolah yang tergolong baik dan sekolah yang tergolong cukup.

Dilihat dari sisi pengeluaran, keterkaitan antara pengeluaran biaya pendidikan dengan mutu sekolah disajikan dalam Tabel 8.

Tabel 8 Mutu Sekolah Negeri dan Swasta dan Profil Sisi Pengeluaran
(dalam rata-rata persen per sekolah)

No	Mutu Sekolah (n)	Profil Sisi Pengeluaran				Rata-rata
		Gaji/Kesj	PBM	Sarana/Pra	Ekstrakur	
1.	Negeri					
	a. Baik (21)	3,69	4,24	4,28	3,55	3,94
	b. Cukup (6)	3,76	0,56	1,69	4,24	2,56
	Rata-rata (27)	3,73	2,40	2,99	3,90	3,25
2.	Swasta					
	a. Baik (4)	9,79	49,33	6,82	7,70	18,41
	b. Cukup (2)	15,21	25,34	36,37	34,61	27,88
	Rata-rata (6)	12,50	37,34	21,60	21,16	23,15

Melihat sisi pengeluaran sebagaimana disajikan pada Tabel 8, beberapa kesimpulan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Pengeluaran untuk gaji pada sekolah negeri baik yang tergolong baik maupun cukup, persentasenya relatif tidak menunjukkan perbedaan yang berarti. Lain halnya pada sekolah swasta, ternyata sekolah swasta yang tergolong cukup persentase pengeluaran untuk gaji relatif tinggi, lebih tinggi dari sekolah negeri dan sekolah swasta yang termasuk baik. Hal ini menunjukkan bahwa pengeluaran gaji pada sekolah swasta yang tergolong cukup sangat tinggi.
2. Persentase pengeluaran untuk proses belajar mengajar rata-ratanya lebih rendah dari persentase pengeluaran untuk gaji, tetapi pada sekolah negeri yang termasuk baik persentase pengeluaran untuk proses belajar mengajar cukup tinggi. Sedangkan pada sekolah swasta, untuk sekolah yang termasuk baik lebih

- besar dari sekolah swasta yang tergolong cukup. Hal ini menunjukkan bahwa untuk meningkatkan mutu proses belajar mengajar memerlukan dana yang cukup.
3. Persentase pengeluaran untuk gedung, sarana, dan prasarana pada sekolah negeri dengan kategori baik lebih besar dari sekolah dengan kategori cukup. Di sekolah swasta sebaliknya. Sekolah dengan kategori cukup memerlukan lebih banyak pengeluaran untuk penyediaan gedung, sarana, dan prasarana. Petunjuk yang diperoleh dari data seperti ini adalah diperlukan penyediaan sarana dan prasarana bagi peningkatan mutu sekolah.
 4. Pola pengeluaran untuk kegiatan ekstrakurikuler ternyata persentase pengeluaran lebih banyak terdapat pada sekolah dengan kategori cukup, baik pada sekolah negeri maupun swasta. Secara umum, sekolah swasta memerlukan lebih banyak dana untuk kegiatan ekstrakurikuler. Informasi umum yang dapat disimpulkan adalah perlu dilakukan kegiatan ekstrakurikuler untuk menarik kegiatan siswa.
 5. Dibandingkan antar komponen pengeluaran, baik untuk gaji, proses belajar mengajar, sarana dan prasarana serta kegiatan kurikuler, persentasenya relatif tidak banyak perbedaan, kecuali pada sekolah negeri dengan kategori cukup dan pada sekolah swasta juga dengan kategori cukup. Yang agak berbeda adalah pada sekolah swasta dengan kategori baik untuk komponen pengeluaran proses belajar mengajar persentasenya sangat tinggi. Kebijakan sekolah masing-masing sangat menentukan alokasi persentase antar pengeluaran.
 6. Pengeluaran dengan persentase lebih banyak untuk proses belajar mengajar, tampaknya menjadi prioritas masing-masing sekolah, khususnya pada sekolah negeri dan swasta yang tergolong baik. Apakah pola seperti ini yang mengkondisikan tercapainya peningkatan mutu sekolah. Jawabannya, sebatas hasil penelitian ini, benar, tanpa tergesa-gesa untuk digeneralisasikan. Mengingat diduga masih adanya keterbatasan sampel penelitian ini.
 7. Pola pengeluaran sebagaimana dijelaskan pada butir 1 sampai 6 di atas, sangat berkaitan dengan pola sumber dana yang sangat terbatas dari pemerintah dan orangtua bagi sekolah negeri. Tetapi, sangat terbuka dari orangtua bagi sekolah swasta.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Sesuai hasil penelitian dan pembahasan yang dikemukakan di atas, beberapa kesimpulan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Sumber pembiayaan SD Negeri masih didominasi oleh penerimaan yang berasal dari pemerintah pusat dan daerah dengan keragaman persentase.
2. Sumber penerimaan SD Swasta, terutama di Kota Yogyakarta, lebih banyak berasal dari orang tua dan bantuan masyarakat. Sumber penerimaan dari orang tua dan masyarakat untuk Kabupaten Sleman dan Kabupaten Kulon Progo masih relatif sedikit.
3. Pola pengeluaran pada sekolah negeri sebagian besar masih dipergunakan untuk membayar gaji guru. Alokasi untuk kegiatan proses belajar mengajar, pengadaan perlengkapan, sarana dan prasarana masih sangat sedikit, kecuali pada sekolah swasta yang tergolong cukup.
4. Dilihat dari besarnya biaya langsung dan tidak langsung, pola yang ditemukan adalah orang tua harus menyediakan uang lebih banyak untuk membiayai anaknya yang sekolah di swasta daripada di sekolah negeri dan menyediakan lebih banyak uang untuk biaya langsung daripada biaya tidak langsung.
5. Besarnya rata-rata unit cost sekolah swasta jauh lebih tinggi daripada sekolah negeri.
6. Baik dari sisi sumber dana maupun dari sisi pengeluaran ditemukan adanya pola keterkaitan antara mutu sekolah dengan profil pembiayaan pendidikan yang cenderung dapat ditafsirkan berkorelasi positif.

Atas dasar lima kesimpulan tersebut, beberapa saran perbaikan arah pembiayaan pendidikan agar dapat dibuat suatu model pembiayaan pendidikan yang lebih merata, efisien, dan meningkatkan mutu dan pemerataan pendidikan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Perlu dibuat suatu rancangan kebijakan dasar untuk mengurangi sedikit-demi sedikit ketergantungan pembiayaan pendidikan kepada pemerintah pusat, dan meningkatkan sumber dana yang berasal dari masyarakat untuk sekolah-sekolah negeri.

2. Sumber dana dari orang tua untuk sekolah swasta perlu diikuti dengan penggalan dana dari usaha swasta dan usaha-usaha produktif dari pihak sekolah oleh karena sumber dana yang berasal dari orang tua bukan tidak terbatas, melainkan ada titik batasnya.
3. Pola penggalan dana sangat diperlukan untuk memperbaiki proses pembelajaran di dalam kelas. Pola alokasi pengeluaran yang terjadi selama ini kurang mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan.
4. Perlu ada ketegasan dan komitmen politik dari pemerintah, siapa sebenarnya yang harus bertanggung jawab membiayai pendidikan dasar, kalau pemerintah berkeinginan menuntaskan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun.
5. Perlu dibuat pembakuan rata-rata biaya pendidikan untuk sekolah dasar agar tidak terjadi ketimpangan besarnya rata-rata unit cost antara sekolah negeri dan sekolah swasta yang didasarkan pada baku-mutu yang setingkat.
6. Analisis dan penelitian lanjutan masih perlu dilakukan yang fokusnya pada analisis marginal dan nilai tambah pada pembiayaan pendidikan sekolah dasar dilengkapi dengan penelitian pada tingkat SLTP dalam konteks wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun.
7. Model pembiayaan pendidikan yang perlu dikembangkan mengacu pada keswadayaan masyarakat yang berorientasi pada peningkatan proses pembelajaran dan mengurangi ketimpangan mutu dan pemerataan pendidikan antar sekolah dan antar daerah kota/kabupaten.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, Don. 1998. *Education and National Development in Asia: Trends, Issues, Policies, and Strategies*. Paper presented for The Asian Development Bank.
- Arcaro, J.S. 1995. *Quality in Education*. Delray Beach Florida: St. Lucy Press
- Berne, R dan Stiefel, L. 1995. *Student-Level School Resources Measures*. Selected Papers in School Finance 1995. Tersedia di <http://nces.ed.gov/pubs.97/975.36>
- Betts, J.R. *Return to Quality of Education. Economics of Education Series 1*. Tersedia di <http://w.w.w.worldbank.org/ed.invest.betts.htm>.
- Bray, M. 1996. *Decentralization of Education. Community Financing*. Washington: The World Bank.
- Burki, S.J., Guillermo E. Perry, dan William R. Delinger. 1999. *Beyond the Center: Decentralizing the State*. Washington D.C: World Bank.
- Burnett, N, Karl Marble, Harry Anthony Patrinos. 1995. *"Setting Investment Priorities in Education. Finance and Development*. December.
- Caldwell. 1996. *Principles and Practices in Resources Allocation to Schools under Conditions of Radical Decentralization*. Development in School Finance 1996. Tersedia di <http://nces.ed.gov/pubs97/975.35.h.html>
- Chapman, D.W, dan Windham D.M. 1986. *The Evaluation of Efficiency in Educational Development Activities*. Florida : IEES.
- Clark, dkk. 1998. *Financing of Education in Indonesia*. Asian Development Bank Comparative Education Research Centre The University of Hong Kong.
- Dandekar, V.S. 1996. *Community Resources Mobilization*. Paper presented at the Conference on Reforming School Education. NIEPA. New Delhi.
- Fiske, E.B. 1996. *Decentralization of Education Policies and Consensus*. Washington DC: The World Bank.
- Forestal, K. dan Robb Cooper. 1997. *Decentralization of Education: Legal Issues*. Washington DC: World Bank.
- Greenwald R, Hedges L.V, dan Laine R.D. 1996. *Interpreting Research on School Resources and Student Achievement : A Rejoinder to Hanushek. Review of Educational Research*. Volume 66, No 3, hal 411-416.

- Greenwald R, Hedges L.V, dan Laine R.D. 1996. *The Effect of School Resources on Student Achievement. Review of Educational Research.* Volume 66, No 3, hal 361-396.
- Habibi, Nabil et al. 2001. Decentralization in Argentina. Economic Growth Center. Yale University. Social Science Research Network electronic library. Tersedia di <http://papers.ssrn.com/paper.tab?abstract.id.275291>
- Hanushek, E.A. 1996. "A More Complete Picture of School Resources Policies" in *Review of Educational Research*, Vol. 66, No. 3, hal. 397-409.
- Hanushek, E.A. 1997. "Assessing the Effect of School Resources on Student Performance: An Update" in *Educational Evaluation and Policy Analysis*, Vol. 19, No. 2, hal 141-164.
- "Indonesia Sustaining High Growth with Equity" in The World Bank Report No. 16433-IND, May, 30, 1997.
- Jalal, Fasli dan Dedi Supriyadi (Editor). 2001. *Reformasi Pendidikan Dalam Konteks Otonomi Daerah*. Jakarta: Depdiknas-Bappenas-Adicita Karya Nusa.
- King, E.M. dan Berk Ozler. 1998." *What's Decentralization Got To Do With Learning? The Case of Nicaragua's School Autonomy Reform*' Paper presented at the Annual Meeting of the American Educational Research Associations. San Diego, CA.
- Mankoe, J. dan Maynes, B. 1992. *Decentralisation of Educational Decision Making – in Ghana*. Pergamon.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
- Picus, L.O. 1995. *Does Money Matter in Education? A Policymaker's Guide*. Selected Papers in School Finance 1995. Tersedia <http://nces.ed.gov/pubs.97/975.36>
- Picus, L.O. 2000. *How Schools Allocate and Use Their Resources*. ERIC Digest 143. Desember 2000. Tersedia <http://eric.uoregon.edu/publications/digest/digest>
- Sinnette, L.J. 1993. Decentralization: Why, How and Toward What Ends. NCREL's Policy Briefs, Report 1. Tersedia di <http://www.ncrel.org>
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

IDENTIFIKASI PROFIL PEMBIAYAAN PENDIDIKAN UNTUK
MENINGKATKAN MUTU DAN PEMERATAAN PENDIDIKAN DASAR
DI PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ANGKET DATA SEKOLAH
(diisi oleh Kepala Sekolah, wakil Guru dan Orang Tua)

Identitas Sekolah

- | | | | |
|-------------------|---|--|------------------|
| 1. Kode SD/MI | : | | (diisi peneliti) |
| 2. Nama SD/MI | : | | |
| 3. Alamat | : | | |
| 4. Cabang Dinas | : | | |
| 5. Kecamatan | : | | |
| 6. Kota/Kabupaten | : | | |

Petunjuk

Mohon pertanyaan singkat di bawah ini diisi sesuai dengan kondisi yang ada di sekolah pada tempat jawaban yang disediakan.

1. Siswa

1. Jumlah siswa terdaftar				
No.	Kelas	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Kelas 1			
2.	Kelas 2			
3.	Kelas 3			
4.	Kelas 4			
5.	Kelas 5			
6.	Kelas 6			
	Jumlah			
2. Siswa Penerima Beasiswa/Bantuan				
No.	Kelas	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Kelas 1			
2.	Kelas 2			
3.	Kelas 3			
4.	Kelas 4			
5.	Kelas 5			
6.	Kelas 6			
	Jumlah			

2. Guru

1. Jumlah Guru				
No.	Kelas	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Kelas 1			
2.	Kelas 2			
3.	Kelas 3			
4.	Kelas 4			
5.	Kelas 5			
6.	Kelas 6			
	Jumlah			
2. Kualifikasi Guru				
No.	Latar Belakang	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Pendidikan keguruan, mengajar sesuai pendidikannya			
2.	Pendidikan keguruan, mengajar tidak sesuai bidangnya			
	Jumlah			
3. Tingkat Pendidikan Guru				
No.	Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	SPG			
2.	D I			
3.	D II			
4.	Sarjana Muda/DIII			
5.	Sarjana			
6.	Lainnya:			
	Jumlah			
4. Pengalaman Mengajar Guru				
No.	Pengalaman	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Kurang dari 5 tahun			
2.	05 - 10 tahun			
3.	11 - 15 tahun			
4.	16 - 20 tahun			
5.	Lebih dari 20 tahun			
5. Status Kepegawaian Guru				
No.	Status Kepegawaian	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	PNS			
2.	Non PNS (Yayasan)			
	Jumlah			

3. Rata-rata nilai Ebta, Ebtanas dan Cawu

1. Rata-rata nilai Ebtanas Th. 2000/2001				
No	Mata Pelajaran	Ebta	Ebtanas	NEM
1.	Bahasa Indonesia			
2.	Matematika			
3.	IPA			
4.	IPS			
5.	PPKN			
	Rata-rata			
2. Rata-rata Nilai Cawu per Kelas per Cawu (Th. 2000/2001)				
No.	Kelas	Cawu I	Cawu II	Cawu III
1.	Kelas 1			
2.	Kelas 2			
3.	Kelas 3			
4.	Kelas 4			
5.	Kelas 5			
6.	Kelas 6			
	Rata-rata			
3. Indikator Lain Sekolah (dalam %)				
No.	Indikator	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Angka Kenaikan Kelas			
2.	Angka Melanjutkan			
3.	Angka Putus Sekolah			
4.	Angka Tinggal Kelas			
5.	Angka Absensi			

4. Fasilitas Sekolah

Jumlah dan Keadaan Fasilitas Sekolah				
Jenis Fasilitas Sekolah	Jumlah	Keadaan		
		Kurang Baik	Baik	Sangat Baik
1. Ruang Kelas				
2. Perpustakaan				
3. Ruang Kepala Sekolah				
4. Ruang Guru				
5. Ruang Tamu				
6. Ruang Kantor				
7. Toilet Guru				
8. Toilet Siswa				

9. Kantin				
10. Gudang				
11. Ruang PPPK				
12. Ruang Pertemuan				
13. Lapangan Olahraga				
14. Jaringan air bersih				
15. Jaringan air kotor				
16. Jaringan Listrik				
17. Perkiraan luas tanah				
18. Perkiraan luas bangunan				
19. Mebeler siswa				
20. Mebeler guru				
21. Alat bantu Pengajaran				
22. Buku Perpustakaan				
23. Buku Pegangan Guru				
24. Bahan Pengajaran				
24. Peralatan komunikasi				
25. Lainnya				

5. Bagaimana kondisi anggaran belanja sekolah:

A. Penerimaan

Sumber Dana	Th.2000/2001	2001/2002
Saldo awal		
1. Pemerintah Pusat		
a.		
b.		
c.		
d.		
e.		
2. Pemerintah Daerah		
a.		
b.		
c.		
d.		
e.		
3. Orangtua siswa		
a. Uang pangkal		
b. Uang sekolah		
c. BP3		
d. Uang Ebta/Ebtanas/Tes		
e. Ekstrakurikuler		
f.		
g.		
h.		

4. Bantuan masyarakat		
a. Yayasan		
b. Pengusaha		
c. Lain-lain		
5. Sumber lain-lain		
a.		
b.		
Jumlah Penerimaan		

B. Pengeluaran

Jenis Pengeluaran	Tahun 2000/2001	Tahun 2001/2002
1. Gaji Guru		
2. Gaji Guru DPK		
3. Gaji Guru Honorer		
4. Kesejahteraan Guru		
a.		
b.		
5. Proses belajar mengajar		
a.		
b.		
c.		
d.		
e.		
6. Pemeliharaan sarana		
a. Gedung		
b. Alat		
c.		
d.		
e.		
7. Rehabilitasi		
8. Pengadaan sarana/prasarana		
a. Buku		
b.		
c.		
d.		
9. Ekstrakurikuler		
a.		
b.		
c.		
d.		

10. Lain-lain		
a.		
b.		
c.		
d.		
e.		
11. Saldo Akhir Tahun		
Jumlah Pengeluaran		

6. Bapak dan Ibu sebagai orang tua siswa yang masih di SD atau MI, berapa rata-rata pengeluaran uang untuk biaya pendidikan:

Pengeluaran untuk	Jumlah (rupiah)
1. Dibayarkan langsung ke sekolah	
a. SPP per bulan	
b. Lainnya (jika ada sebutkan)	
1)	
2)	
3)	
4)	
5)	
Jumlah yang dibayarkan ke sekolah	
2. Dibelanjakan langsung:	
a. uang transport/hari	
b. uang jajan/hari:-	
c. uang buku/tahun	
d. uang seragam/tahun	
e. uang les tambahan/kegiatan	
f. Lainnya (jika ada sebutkan)	
1)	
2)	
3)	
4)	
5)	
Jumlah yang dibelanjakan langsung	
1. Apakah Bapak dan Ibu memberi bantuan ke sekolah lain di luar sekolah tempat putra/putri Bapak dan Ibu bersekolah?	Ya/Tidak. Jika ya, berapa dan bagaimana bentuknya: rutin/insidental.

7. Lingkungan Masyarakat

Bagaimana pendapat Bapak/Ibu sebagai Kepala Sekolah atas beberapa hal di bawah ini:

1. Tingkat aspirasi masyarakat di sekitar sekolah terhadap pendidikan:

2. Tingkat keamanan di masyarakat di sekitar sekolah:

3. Tingkat kesehatan masyarakat di sekitar sekolah:

4. Penyediaan dan layanan transportasi umum:

5. Penyediaan dan layanan jasa komunikasi bagi masyarakat (tv, radio, telpon, wartel, dll)



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

LEMBAGA PENELITIAN

Alamat: Karangmalang, Yogyakarta. 55281. Telp. (0274) 586168 pes. 242, 262,
Fax. (0274) 518617. E-mail: LPIKIPYK@yogya.wasantara.net.id

LAPORAN PELAKSANAAN SEMINAR LAPORAN HASIL PENELITIAN

1. Nama Peneliti : **Yoyon. Suryono**
2. Jurusan :
3. Fakultas : ... **FIP**
4. Status Penelitian : a. Mandiri
 b. Kelompok
c. Latihan
d. Lain-lain —
5. Judul Penelitian : ... **Pengembangan Model Pembiayaan Pendidikan Untuk
Meningkatkan Mutu Pemerataan Pendidikan Dasar di
Prop. DIY**
6. Pelaksanaan : Tanggal : **27. November 2001**
- Jam :
7. Tempat : ... **Ruang Sidang Lemlit**
8. Dipimpin oleh : Ketua :
- Sekretaris:
9. Peserta : a. Konsultan : ¹ orang
b. Nara sumber : ¹ orang
c. BPP : ² orang
d. Peserta lain : ²⁸ orang
-
- Jumlah : ³⁰ orang

(daftar terlampir)

10. Hasil Seminar

Setelah mempertimbangkan penyajian, penjelasan, argumentasi serta sistematika data tata tulis, Seminar berkesimpulan :

Laporan Hasil Penelitian tersebut di atas :

- a. Diterima, tanpa revisi/pembenahan
- b. Diterima, dengan revisi/pembenahan
- c. Dibenahi, untuk diseminarkan ulang

11. Catatan :

- 1. Data awal dan presentasi selok
- 2. Tabel 1 persentase 100% kelas langganan
- 3. Tabel 4 paledan kota Yogyakarta, Sleman dan Kulon Progo.

Sekretaris,

Mengetahui
Badan Pertimbangan Penelitian

Ketua Sidang

NIP.

NIP.


Siti Partini S.
NIP. 130 257 227



LEMBAGA PENELITIAN

Alamat: Karangmalang, Yogyakarta. 55281. Telp. (0274) 586168 pes. 242, 262,
Fax. (0274) 518617. E-mail: LPIKIPYK@yogya.wasantara.net.id

DAFTAR HADIR SEMINAR

Nama Peneliti : Yayan Suryono, dkk
Fakultas/Unit : Pusbilatik
Judul Penelitian : Model Pembelajaran Pendidikan di SD

Jenis Seminar : Proposal Desain/Instrumen Laporan Hasil

NO	NAMA	GELAR	TANDA TANGAN
1	DRS. EDDY PURNOMO	DRS, M.KES	1
2	IRENE	Dra, M.Si	2
3	Pujadi Suyana	Prof. Dr, M.Pd	3
4	Kapti Asiakin	Dra, M.Pd	4
5	Suharti	Dr. M. Pd	5
6	Siti Maryam	Dra. M.Kes	6
7	SUKARNI Hidayati	Dra, M.S.	7
8	Yayan Suryono	Dr. M.S.	8
9	Suwandi	Drs, M. Hum	9
10	Suharsimi Arikumala	Prof. Dr.	10
11	WURYAN	Prof. Dr. M.S	11
12	Heru Nurcahyo	Dra. M.Kes	12
13	SITI PARTINI S.	Prof. Dr. S.P	13
14	Hajar Pamaelli	Drs. MA (Hors)	14
15	Suparwoto	Drs. ST. Pd Prof	15
16	Si Hanti K	Dra. M. Kes	16
17	ALIYAH	PROF. DR. M.Pd.	17
18	J. Hamboto	Drs. M.Pd	18
19	Peneliti	Prof. Dr	19

20	Burhan N.	Dr. H.H.		20	<i>[Signature]</i>
21	Drs. Suganta, MSi		21		<i>[Signature]</i>
22	JAMBANG RA.	Drs. M.KES		22	<i>[Signature]</i>
23	Faiida Helwan		23	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
24	ASTUTI	IR, MP		24	<i>[Signature]</i>
25	DEDJ Sunjarsono	Drs.	25	<i>[Signature]</i>	
26	Fitri Irawati	DRK.		26	<i>[Signature]</i>
27	Sumansono	IR, MP.	27	<i>[Signature]</i>	
28	Wisnu Gyana	Drs M.Pd		28	<i>[Signature]</i>
29			29		
30				30	
31			31		
32				32	
33			33		
34				34	
35			35		
36				36	
37			37		
38				38	
39			39		
40				40	
41			41		
42				42	
43			43		
44				44	
45			45		

Ketua Sidang

.....